

Sastra dan Politik

Oleh: Afifah Nada Putri Ramadhani, S.S.

Sejarah sastra Indonesia mencatat bahwa hubungan sastra dan politik selalu berada dalam sebuah tegangan yang sulit diredakan. Sastra dan politik merupakan dua wacana yang tidak pernah hidup berdampingan secara damai dan harmonis, bahkan sejak awal pertumbuhannya. Misalnya saja, kebijakan kesusastraan pada zaman pemerintah kolonial Belanda menabukan ideologi, agama, dan politik. Karya sastra yang dinilai bermuatan ideologi, agama, dan politik tertentu saat itu tidak akan dimuat dalam Penerbitan Balai Pustaka milik pemerintah.

Pada era kedudukan Jepang, warna sastra yang lahir saat itu adalah cita-cita peperangan dan kepentingan pemerintah penguasa. Karya sastra yang seturut dengan kemauan Jepang jelas akan memperoleh kesempatan publikasi, sedangkan karya yang berhaluan lain pasti akan disingkirkan. Begitu juga pada zaman Orde Baru (1966—1998), periode itu penuh dengan pergolakan yang dapat dilihat dari pertentangan para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya masing-masing. Praktik-praktik penyensoran, pembredelan, pembakaran terhadap karya-karya yang tak sesuai dengan keinginan pemerintah terus terjadi. Pada masa Orde Baru, karya sastra yang mempersoalkan tragedi 1965 tidak banyak diterbitkan. Hal itu dinilai mencederai bangsa dan merendahkan muruah pemerintah. Perhatian terhadap representasi tragedi 1965 dalam karya-karya sastra juga tidak banyak diberikan. Hal itu tidak lain karena selama pemerintahan rezim Orde Baru, pengetahuan tentang tragedi 1965 yang diajarkan di sekolah-sekolah dan disosialisasikan kepada masyarakat hanya berasal dari pengetahuan tunggal, yaitu sumber-sumber resmi kenegaraan. Diskursus itu disosialisasikan melalui buku-buku sejarah terbitan penguasa, keputusan dan peraturan negara, monumen dan museum, hari peringatan, film, dan sebagainya. Pengetahuan dari sumber lain, seperti dari karya sastra, cenderung diabaikan.

Ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah ilmu sastra, merupakan wacana yang tidak pernah netral atau objektif. Ia selalu memiliki kepentingan yang memihak. Sastra menjadi sebuah upaya diskursif yang bersifat sadar diri, yang bertujuan menafsirkan dan mengintervensi dunia. Jika dicermati, sesungguhnya kesusastraan Indonesia tak terpisahkan dari pergolakan politik masyarakatnya. Politik dan sastra selalu berkelindan. Momentum sosial-politik dipergunakan sebagai ancangan periodisasi sastra, seperti angkatan Jepang, Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 1945, dan sebagainya. Pada setiap masa, sastra juga

memiliki tokoh-tokohnya. Situasi yang lahir pada sebuah masa, menghayati kelahiran karya sastra. Politik memberikan warna masing-masing dalam kelahiran karya sastra.

Sejarah dapat meretas berdasarkan politik kekuasaan yang memegang kendali saat itu. Pembongkaran terhadap suatu sejarah yang terbungkam dan ideologi yang dikembangkan penguasa pada zamannya bisa menggunakan jalan sastra. Meski tidak selamanya sastra akan membongkar sejarah, sejarah juga bukanlah sesuatu yang monolitik. Keduanya memiliki subjektivitas. Keberpihakan ada kepada siapa yang menulis dan membacanya. Karya sastra sebagai karya fiksi tetap tidak dapat menjadi sebuah penulisan sejarah. Karya sastra hanya mampu memberikan wacana-wacana atas wacana yang terjadi dalam sejarah yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, antara sastra dan wacana sejarah terdapat hubungan intertekstualitas. Artinya, antara fiksi dan wacana fakta terdapat hubungan yang keduanya sama-sama mereproduksi dan memberikan komentar atas fakta sejarah yang sebenarnya. Keduanya memiliki suatu media yang sama, yaitu bahasa.

Menurut Foucault, bahasa tidak transparan. Konsep pemikiran paling penting miliknya adalah tentang wacana. Akan tetapi, untuk memahami berbagai konsep wacananya, juga harus paham konsepnya tentang 'bahasa'. Menurutnya, bahasa bukanlah cermin realitas. Bahasa ditentukan oleh *episteme* (pengetahuan). Bahasa adalah alat yang digunakan *episteme* untuk mengatur dan menyusun kenyataan sesuai dengan kepentingan *episteme* itu sendiri (Ankersmit, 1987:312 dalam Taum, 2015:33). Sejalan dengan itu, bahasa akan menjadi setir terkait subjektivitas antara teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra. Melalui bahasa juga, teks menjadi penampung dan juga refleksi ideologi yang melatarbelakangi peristiwa sejarah yang terekam sebagai sebuah konstruksi pada masa kini.

Sumber

Aziz, Munawir. 10 Oktober 2010. *Teks yang Mengguncang Penguasa*. www.radiobuku.com.

Diakses pada 27 Juni 2018.

Fathoni, Moh. 2013. *Kritik Sastra Puitika Kultural Stephen Greenblatt Metode dan Praktik Analisis*. Jurnal Poetika Vol. I No. 2.

Faruk. 2017. *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Taum, Yoseph Yapi. 2015. *Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.